

PENDIDIKAN DAN KESETARAAN GENDER

Nurobiyanto¹, M. Tsulutsallaily², Mahmud³, Mohamad Erihadiana⁴
^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati

¹rdnurrobiyanto@gmail.com, ²tsulutsallaily27@gmail.com,
³mahmud@uinsgd.ac.id, ⁴erihadiana@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Over the past two decades, discussions about gender have become increasingly prominent. Various events related to women's issues worldwide have spurred extensive debates on feminist thought, particularly focusing on "gender relations." Numerous studies on women have been conducted across campuses, in seminars, mass media publications, discussions, and various research projects, almost all addressing the discrimination and injustices faced by women. Women's studies centers have proliferated at many universities, driven by the need for new concepts and perspectives to understand women's conditions and positions.

Keywords: Gender, gender equality, Education

ABSTRAK

Sejak dua dasawarsa terakhir, diskursus tentang *gender* sudah mulai ramai dibicarakan orang. Berbagai peristiwa seputar dunia perempuan di berbagai penjuru dunia ini juga telah mendorong semakin berkembangnya perdebatan panjang tentang pemikiran gerakan feminisme yang berlandaskan pada analisis "hubungan *gender*". Berbagai kajian tentang perempuan digelar, di kampus-kampus, dalam berbagai seminar, tulisan-tulisan di media massa, diskusi-diskusi, berbagai penelitian dan sebagainya, yang hampir semuanya mempersoalkan tentang diskriminasi dan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Pusat-pusat studi wanita pun menjamur di berbagai universitas yang kesemuanya muncul karena dorongan kebutuhan akan konsep baru untuk memahami kondisi dan kedudukan perempuan dengan menggunakan perspektif yang baru.

Kata kunci : Gender, Kesetaraan Gender, Pendidikan

A. Pendahuluan

Salah satu tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini adalah keadilan dan kesetaraangender, baik pada aspek akses, mutu dan relevansi maupun pada aspek manajemen pendidikan. Pengembangan model pembelajaran responsif gender pada Madrasah

merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai budaya bias gender sejak dini. Merekayasa pembelajaran menjadi responsif gender dapat dilakukan melalui dua aspek yaitu materi ajar dan proses belajar mengajar. Pengembangan pada materi pelajaran dilakukan dengan menganalisis setiap pesan

terdapat dalam materi pelajaran yang akan disampaikan, apakah telah memenuhi kebutuhan belajar siswa secara adil gender. Sedangkan pengembangan pada proses kegiatan belajar mengajar dilakukan sejak merancang desain model pembelajaran sampai pada proses implementasi pembelajaran di kelas dan dikemas sedemikian rupa sehingga keterterapan parameter keadilan dan kesetaraan gender dapat dilihat dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan penerimaan manfaat dalam setiap komponen desain pembelajaran.

Dalam proses pendidikan di Indonesia secara umum, masih terdapat bias atau ketimpangan gender. Gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat *social construction* dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis. Kaum laki-laki lebih dominan dalam memilih jurusan dan mempelajari kemampuan atau

keterampilan pada bidang kejuruan teknologi dan industri dan seolah-olah secara khusus kaum laki-laki dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam dunia produksi. Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaksanakan peran pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumah-tangga. Perbaikan dalam sistem kurikulum yang menjamin terwujudnya content pendidikan yang berperspektif gender, dalam mengkombinasikan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Fakta menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan masih sering terjadi. Ketimpangan gender merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara integratif holistik dengan menganalisis berbagai faktor dan indikator penyebab yang ikut aktif melestarikannya, termasuk faktor hukum dan pendidikan yang kerap kali mendapat justifikasi agama. Kesenjangan pada bidang pendidikan telah menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap bidang lain di Indonesia, hampir semua sektor, seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran

dimasyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab bias gender adalah karena faktor kesenjangan pendidikan yang belum setara selain masalah-masalah klasik yang cenderung menjustifikasi ketidakadilan seperti intervensi teks-teks keagamaan yang tekstual dan kendala sosial budaya lainnya.

Adanya berbagai hasil penelitian yang menunjukkan terjadinya bias gender pada berbagai dimensi pendidikan sekolah, seperti pada materi pembelajaran, dan ini diyakini dapat melestarikan ideologi gender yang timpang. Pendidikan pada tingkat usia sekolah dasar (MI) merupakan waktu yang paling tepat untuk membentuk karakter manusia. (*character building*) (Setiabudi, Permana, dkk., 2024), sehingga lembaga pendidikan dasar (MI) dipilih menjadi sasaran kegiatan ini. Karena lembaga pendidikan dasar (MI) memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai terhadap diri siswa, termasuk tentang keadilan dan kesetaraan gender. Nilai-nilai tersebut ditransfer dan ditumbuh kembangkan melalui proses pembelajaran. Proses

pembelajaran yang efektif untuk mentransfer dan menumbuh kembangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender harus didukung oleh komponen-komponen seperti; kebijakan pendidikan, kompetensi guru, kurikulum (tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode/strategi pembelajaran, evaluasi) serta fasilitas dan media pendidikan lainnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pendidikan dan kesetaraan gender (Moleong, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai literatur yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diteliti. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang meliputi: 1) Buku: Buku-buku yang membahas tentang pendidikan dan kesetaraan gender; 2) Jurnal Ilmiah: Artikel-artikel yang diterbitkan dalam

jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian; 3) Artikel: Artikel-artikel yang dipublikasikan di media massa atau platform akademik yang membahas isu-isu terkait; 4) Laporan Penelitian: Laporan-laporan penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga penelitian atau akademisi lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah sebagai berikut: 1) Identifikasi dan Pemilihan Sumber: Peneliti mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel untuk dijadikan bahan penelitian. 2) Pengumpulan Data: Peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah dipilih dengan mencatat informasi penting yang relevan dengan topik penelitian. 3) Organisasi Data: Data yang telah dikumpulkan diorganisasi secara sistematis untuk memudahkan analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Langkah-langkah analisis konten meliputi: 1) Pengkodean Data: Data yang telah dikumpulkan diberi kode untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur; 2) Klasifikasi Data: Data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang telah

diidentifikasi untuk memudahkan analisis lebih lanjut; 3) Interpretasi Data: Data yang telah diklasifikasikan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghubungkan temuan dengan teori atau konsep yang relevan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Hal ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan akurasi data (Creswell, 2014).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Isu-Isu Kesenjangan Gender dalam Dunia Pendidikan

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi (*under-*

participation) Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawanjenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah Di negara-negara dunia di mana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki.

2. Kurangnya keterwakilan (*under-representarion*)

Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.

3. Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*) Kegiatan pembelajaran dan proses

interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadang kala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi (Riziqin, 2019).

Hasil penelitian tersebut di atas memberikan gambaran bahwa bias gender dalam bidang pendidikan masih sangat timpang terutama pada tingkat pendidikan sarjana, karena dalam kenyataan empirik membuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang maka tingkat pendapat juga akan itu berpengaruh. Kondisi ini dirasakan oleh perempuan memiliki tingkat pendidikan yang masih rendahdi bandingkan dengan laki-laki. Kesenjangan gender juga dapat dilihat dari angka partisipasi pendidikan, berdasarkan kelompok usia maupun jenjang pendidikan. Berdasarkan angka statistik

pendidikan, angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar (SD) sebesar 96,64% untuk laki-laki, dan sedikit lebih kecil untuk perempuan yaitu sebesar 94,34%. Sedangkan untuk APM tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sudah mengalami kesetaraan gender, meskipun dalam angka yang masih sama-sama menunjukkan hasil rendah yaitu 56,62% laki dan 56,30% perempuan. Angka partisipasi murni (APM) untuk sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) lebih rendah dan untuk perempuan masih lebih rendah lagi, yaitu 34,06% laki-laki dan 31,14% untuk perempuan (Sanah, 2021).

Di samping hasil penelitian tersebut di atas dalam bidang pendidikan terjadi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, juga bias gender termasuk di bidang hukum. Bidang hukum juga sangat signifikan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan lagi-lagi bias gender sangat dirasakan oleh kaum perempuan. Menurut Musda ada tiga aspek ketimpangan gender dalam bidang hukum yaitu pada materi hukum (*content of law*), budaya hukum (*culture of law*), dan struktur hukumnya (*structure of law*)

(Jauhariyah, 2017). Faktor Penyebab Bias Gender dalam Pendidikan Islam Faktor-faktor penyebab bias gender dapat dikategorisasikan ke dalam tiga aspek, yaitu *partisipasi, akses, dan kontrol*. Namun, tidak semua aspek yang disebutkan dapat dipaksakan untuk menjelaskan masing-masing bias gender yang terjadi secara empiris dalam bidang pendidikan. Dengan kata lain faktor-faktor penyebab bias gender akan sangat tergantung dari situasinya masing-masing.

Adapun faktor yang menjadi penyebab bias gender berkaitan dengan perolehan kesempatan belajar pada setiap jenjang pendidikan dasar adalah : Perbedaan angkatan partisipasi pendidikan pada tingkat SD/Madrasah Ibtida'iyah sudah mencapai titik optimal yang tidak mungkin diatasi hanya dengan kebijakan pendidikan, sehingga perbedaan itu menjadi semakin sulit ditekan ke titik yang lebih rendah lagi. Kesenjangan ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktur karena fasilitas pendidikan SD sudah tersebar relatif merata. Faktor-faktor struktural itu di antaranya adalah nilai-nilai sosial budaya, dan ekonomi

keluarga yang lebih menganggap pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting dibandingkan dengan perempuan. Faktor ini berlaku terutama di daerah-daerah terpencil yang jarang penduduknya serta pada keluarga-keluarga berpendidikan rendah yang mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab bias gender dalam bidang kurangnya kontrol kebijakan pendidikan adalah:

1. Faktor kesenjangan antar gender dalam bidang pendidikan jauh lebih dominan laki-laki. Khususnya dalam lembaga birokrasi di lingkungan pendidikan sebagai pemegang kekuasaan atau kebijaksanaan, maupun dalam jabatan-jabatan akademis kependidikan sebagai pemegang kendali pemikiran yang banyak mempengaruhi kebijakan pendidikan. Keadaan ini akan semakin bertambah parah jika para pemikir atau pemegang kebijaksanaan pendidikan tersebut tidak memiliki sensitivitas gender.
2. Khusus pada kebijaksanaan

pendidikan, khususnya menyangkut sistem seleksi dalam pendidikan. Kontrol dalam penerimaan karyawan terutama di sektor swasta sangat dirasakan bias gender. Kenyataan menunjukkan bahwa jika suami istri berada dalam salah satu perusahaan, misalnya Bank, baik milik pemerintah maupun swasta, maka salah satunya harus memilih untuk keluar, dan biasanya perempuanlah yang memilih keluar dari pekerjaan. Ini bagian dari faktor-faktor bias gender dalam bidang pendidikan.

3. Faktor struktural, yakni yang menyangkut nilai, sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat yang secara dominan mempengaruhi keputusan keluarga untuk memilih jurusan-jurusan yang lebih dianggap cocok untuk perempuan, seperti pekerjaan perawat, kesehatan, teknologi kerumahtanggaan, psikologi, guru sekolah dan sejenisnya. Hal ini terjadi karena perempuan dianggapnya memilih fungsi-fungsi produksi

(*reproductive function*). Laki-laki dianggap lebih berperan sebagai fungsi penopang ekonomi keluarga (*productive function*) sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu teknologi dan industri.

4. Pendidikan Islam yang konstruktif merupakan salah satu pendekatan pendidikan melalui pembelajaran induktif, yang berarti mengangkat nilai-nilai faktual empirik. Pendidikan reseptif yang hanya memperkuat hapalan, apabila hapalan itu hilang maka subyek didik tidak akan punya apa-apa lagi, maka diperlukan pendidikan yang demokratis yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan opini, dan mengeskpresikan kemampuan nalar, maka akan melahirkan komunitas intelektual yang cendekiawan.
5. Faktor lain yang turut mempengaruhi bias gender dalam pendidikan adalah muncul persaingan dengan teknologi, yang menggantikan

peranan pekerja perempuan dengan mesin. Dampaknya, lagi-lagi perempuan menjadi korban teknologi khususnya perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah ditambah pula dengan kemampuan ekonomi yang masih lemah (Efendy, 2014).

Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

1. Marginalisasi proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan
 - a. Kerja domestik tidak dihargai setara dengan pekerjaan publik.
 - b. Perempuan sering tidak mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi, waktu luang dan pengambilan keputusan .
 - c. Perempuan kurang didorong atau memiliki kebebasan kultural untuk memilih karir daripada rumah tangga atau akan mendapat sanksi sosial.
 - d. Perempuan sering mendapat upah yang lebih kecil dibanding lelaki untuk jenis pekerjaan yang setara
 - e. Perempuan sering menjadi korban pertama jika terjadi PHK

- f. Izin usaha perempuan harus diketahui ayah (jika masih lajang & suami jika sudah menikah, permohonan kredit harus seizin suami
 - g. Pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan tertentu terhadap perempuan
 - h. Ada beberapa pasal hukum dan tradisi yang memperlakukan perempuan tidak setara dengan laki-laki: harta waris, gono-gini, dst.
 - i. Kemajuan teknologi sering meminggirkan peran serta perempuan.
2. Sub-Ordinasi atau penomorduaan
- a. Masih sedikit perempuan yang berperan dalam level pengambil keputusan dalam organisasi / pekerjaan
 - b. Perempuan yang tidak menikah atau tidak punya anak dianggap lebih rendah secara sosial sehingga ada alasan untuk poligami.
 - c. Perempuan dibayar sebagai pekerja lajang atau bahkan dikeluarkan karena alasan menikah atau hamil,
 - d. Ada aturan pajak penghasilan perempuan lebih tinggi dari laki-laki karena perempuan dianggap lajang.
- e. Beberapa pasal hukum tidak menganggap perempuan setara dengan laki-laki misalnya : pendirian izin usaha, pengelolaan harta (suami wajib mengemudikan harta pribadi isteri)
 - f. Dalam materi pendidikan agama Islam tentang hukum waris masih menjadi sebuah fenomena.
3. *Stereotipe* (Pelabelan Negatif)
- a. Perempuan: sumur-dapur–kasur- macak - masak–manak: “sekedar ibu rumah tangga” dan dianggap sebagai pengangguran, walaupun bekerja dianggap sebagai perpanjangan peran domestik : guru TK, sekretaris, bagian penjualan, dst.
 - b. Perempuan emosional, tidak rasional dan tidak mandiri sehingga tidak berhak pada fungsi perwakilan dan pemimpin.
 - c. Perempuan tidak mampu mengendalikan syahwat jika diberi kebebasan : tradisi sunat perempuan, perda tentang

- larangan keluar malam bagi perempuan, janda dianggap sebagai berpotensi mengganggu rumah tangga orang.
- d. Pria adalah tulang punggung keluarga dan pencari nafkah tidak peduli seperti apapun kondisinya, jika gagal dicap sbg “tidak bertanggungjawab”.
 - e. Pria adalah Kehebatannya dilekatkan pada kemampuan seksual dan karirnya, menganggap “wajar” jika laki-laki menggoda perempuan, selingkuh, poligami.
4. Beban Ganda (*Double Burden*)
- a. Beban pekerjaan di rumah tidak berkurang dengan adanya peran publik dan peran pengelolaan komunitas (walaupun perempuan telah masuk dalam peran publik/menitikarier peran dalam rumah tangga masih besar).
 - b. Pekerjaan dalam rumah tangga, sebagian besar dikerjakan ibu dan anak perempuan sedangkan ayah dan anak lelaki terbebas dari pekerjaan domestik.
 - c. Perempuan sebagai perawat, pendidik anak, pendamping suami, juga pencari nafkah tambahan,
 - d. Perempuan pencari nafkah utama masih harus mengerjakan tugas domestik,
 - e. Lelaki meski bekerja sebagai mencari nafkah, tetap harus terlibat dalam peran sosial kemasyarakatan, karena tidak dapat diwakili oleh perempuan.
5. Violence atau Kekerasan Terhadap Perempuan baik Fisik & Non Fisik
- a. Larangan untuk belajar atau mengembangkan karir
 - b. Penggunaan istilah yang menyebut ciri fisik atau status sosial : bahenol, janda kembang, perawan tua, nenek lincah, dst,
 - c. Tindakan yang diasosiasikan sebagai pernyataan hasrat seksual: kerdipan, suitan, rangkulan, *green jokes*,
 - d. Pemaksaan atau sebaliknya pengabaian penggunaan kontrasepsi,
 - e. Pencabulan, perkosaan, inses,
 - f. Pembatasan atau pengabaian pemberian nafkah
 - g. Penggunaan genitalitas

- perempuan sbg alat penaklukan baik pada masa damaiataupun perang,
- h. Perselingkuhan atau poligami tanpa izin isteri,
 - i. Pemukulan atau penyiksaan fisik lain,
 - j. Pengurungan di dalam rumah,
 - k. Pemasungan hak-hak politik
 - l. Pemaksaan perkawinan
 - m. Pemaksaan pindah agama mengikuti agama pasangan,
 - n. Perendahan martabat laki-laki dan perempuan semata-mata sebagai objek seks dalam iklan,
 - o. Pria yang tidak “macho” atau maskulin atau gagal di bidang karir dianggap kuranglaki-laki, dan akan dilecehkan dalam masyarakat (Anggoro, 2019).

Faktor Penyebab terjadinya ketidakadilan Gender

1. Nilai sosial dan budaya patriarkhi sama dengan pranata kehidupan yang berdasarkan pandangan laki-laki.
2. Produk dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender;
3. Pemahaman ajaran agama yang

tidak komprehensif dan cenderung parsial;

4. Kelemahan kurang percaya diri, tekad & inkonsistensi kaum perempuan sendiri dlm memperjuangkan nasibnya;
5. Pemahaman para pemimpin dan pengambil keputusan terhadap makna Kesetaraan dan Keadilan Gender yang belum mendalam (Susanto, 2016)

Upaya Penanggulangan Dampak Negatif dari Bias Gender Pendidikan dalam Islam

Adapun upaya untuk mengatasi bias gender dalam pendidikan Islam melalui upaya sebagai berikut :

1. Reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bias gender, dilakukan secara kontinu agar ajaran agama tidak dijadikan justifikasi sebagai kambing hitam untuk memenuhi keinginan segelintir orang.
2. Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan berbasis kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan. Kurikulum

disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi daerah, yang di mulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi (Setiabudi, Ramadhana, dkk., 2024).

3. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti pemberian fasilitas belajar mulai di tingkat kelurahan sampai kepada tingkat kabupaten/kota dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
4. Pemberdayaan di sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga terutama dalam kegiatan industri rumah tangga (*home industri*) dengan demikian perlahan-lahan akan menghilangkan ketergantungan ekonomi kepada laki-laki. Karena salah satu terjadinya marginalisasi pada perempuan adalah ketergantungan ekonomi keluarga kepada laki-laki.
5. Pendidikan politik bagi perempuan agar dilakukan secara intensif untuk menghilangkan melek politik bagi

kaum perempuan. Karena masih ada anggapan bahwa politik itu hanya milik laki-laki, dan politik itu adalah kekerasan, padahal sebaliknya politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan. Dengan demikian kuota 30% sesuai dengan amanah Undang-Undang segera terpenuhi, mengingat pemilih terbanyak adalah perempuan.

6. Pemberdayaan di sektor ketrampilan (*skill*) baik ketrampilan untuk kebutuhan rumah tangga, maupun yang memiliki nilai jual di tingkatkan terutama kaum perempuan di pedesaan agar terjadi keseimbangan antara perempuan yang tinggal di perkotaan dengan pedesaan sama-sama memiliki ketrampilan yang relatif bagus.
7. Sosialisasi Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah tangga lebih intens dilakukan agar kaum perempuan mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanah dari UUAK

D. Kesimpulan

Pendidikan yang berperspektif gender memegang peranan penting dalam mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi gender yang masih banyak terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang responsif gender dalam pendidikan, mulai dari materi ajar hingga proses belajar mengajar, mampu memutus mata rantai budaya bias gender sejak dini. Pengembangan kurikulum yang mengkombinasikan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan secara setara adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil. Selain itu, faktor-faktor seperti partisipasi, representasi, dan perlakuan yang adil dalam pendidikan harus terus diperhatikan untuk menghilangkan kesenjangan gender yang ada. Dengan demikian, pendidikan berperspektif gender tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, tetapi juga pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender secara keseluruhan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1). <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0098.129-134>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4 ed.). SAGE Publications.
- Efendy, R. (2014). KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 142–165. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v7i2.239>
- Jauhariyah, W. (2017). Retrieved from Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Perempuan Online*, 7((3)).
- Moleong, Lexy. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Riziqin, A. (2019). Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah. *SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 16((2)).
- Sanah, B. (2021). Implementasi Keadilan Gender Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16((1)).

Setiabudi, D. I., Permana, G., Destian, I., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). *PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN DI MASYARAKAT: PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM. 09.*

Setiabudi, D. I., Ramadhana, A., Permana, G., Hambali, A., & Basri, H. (2024). *INTEGRASI NILAI-NILAI FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DALAM MANAJEMEN KURIKULUM DI SEKOLAH-SEKOLAH ISLAM. 09.*

Susanto, N. H. (2016). *TANTANGAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM BUDAYA PATRIARKI. Muwazah, 7(2).*
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>